

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR KARET ALAM DI PROVINSI RIAU¹

Djaimi Bakce², Almasdi Syahza³, dan Nur Hamlin⁴

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Email: djaimibakce@yahoo.com

Abstrak

Pengembangan industri hilir karet alam Provinsi Riau maupun di Indonesia cenderung stagnan dan menghadapi masalah yang sangat serius karena sistem insentif dan pengawasan yang lemah terhadap perkebunan karet rakyat untuk menghasilkan produk-produk karet berkualitas. Secara umum makalah ini bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang strategi pengembangan industri hilir karet alam di Provinsi Riau. Secara spesifik bertujuan untuk menggambarkan potensi pengembangan industri hilir, dan merumuskan strategi pengembangan industri karet alam di Provinsi Riau. Jenis Penelitian adalah eksploratif yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan dalam menyusun strategi kebijakan. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan. Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa tingginya potensi pengembangan industri hilir karet alam di Provinsi Riau yang diperlihatkan oleh tingginya daya dukung wilayah, dan permintaan terhadap produk-produk hilir karet sangat tinggi dan cenderung meningkat. Tiga strategi pokok perlu diimplementasikan dalam pengembangan industri hilir karet di Provinsi Riau. Pertama, memperkuat pengembangan hulu-hilir industri karet alam, yakni menggalakkan kembali sistem kemitraan antara perusahaan dan petani, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara yang dihasilkan dalam jangka pendek, dan mendorong pengembangan industri hilir karet yang mampu menghasilkan produk-produk akhir yang bernilai tambah tinggi dalam jangka menengah dan panjang. Kedua, mempercepat pembangunan kluster industri karet alam melalui pengembangan kawasan industri Plintung Dumai, Kuala Enok dan Buton. Ketiga, menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, melalui peningkatan peringkat kemudahan melakukan usaha.

Kata kunci: industri hilir, karet alam, strategi

Abstract

The development of downstream industries of natural rubber in the Riau Province and Indonesia are stagnant and facing a very serious problem because the system of incentives and weak oversight of the smallholders rubber plantation to produce quality rubber products. In general, this paper aims to convey basic thoughts about the strategy of development of downstream industries of natural rubber in the Riau Province. Specifically aims to illustrate the potential for development of natural rubber downstream industries, and formulate the development strategies of natural rubber industry in Riau Province. The study was explorative kind that aims to investigate the pattern and sequence of growth or change in formulating policy strategy. The research was conducted through a survey method development. The main findings of this study indicate that a high potential for the development of downstream industries of natural rubber in Riau Province which is shown by the high carrying capacity of the region, and the demand for downstream rubber products is very high and likely to increase. Three basic strategies are implemented important in the development of downstream rubber industry in Riau Province. First, strengthen the development of upstream-downstream natural rubber industry, namely .promoting the return system is a partnership between companies and farmers, improve the capacity and quality of intermediate products produced in the short term, and encourage the

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Kongres ISEI XIX di Surabaya, 7-9 Oktober 2015, dengan tema: Menghidupkan Kembali Sektor Industri sebagai Penggerak Ekonomi Nasional.

² Kepala Pusat Studi Perkebunan, Gambut dan Pedesaan LPPM Universitas Riau, Staf pengajar Prodi Agribisnis Universitas Riau

³ Peneliti dan Pengamat Ekonomi Pedesaan LPPM Universitas Riau

⁴ Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Riau

development of downstream rubber industry capable of producing the end products of high added value in the medium and long term. Second, accelerate the development of the natural rubber industry clusters through the development of an industrial area Plintung Dumai, Kuala Enok and Buton. Third, creating a climate conducive investment and business, through increased ease of doing business rankings.

Keywords: downstream industry, natural rubber, strategy

PENDAHULUAN

Terdapat tiga tanaman perkebunan yang menjadi andalan dalam pembangunan pertanian di Provinsi Riau, yakni tanaman kelapa sawit, kelapa dan karet. Dari aspek luas areal maupun aspek produksi, tanaman kelapa sawit menempati urutan teratas diikuti oleh tanaman kelapa dan karet. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Riau (2014) luas areal dan produksi tanaman kelapa sawit cenderung meningkat dari 1.673.551 hektar dan 5.764.201 ton pada tahun 2008 menjadi 2.372.402 hektar dan 7.340.809 ton pada tahun 2012. Sementara itu luas areal dan produksi tanaman kelapa cenderung menurun dari 553.657 hektar dan 575.612 ton pada tahun 2008 menjadi 521.792 hektar dan 473.221 ton pada tahun 2012. Demikian juga halnya dengan luas areal dan produksi tanaman karet cenderung menurun dari 528.655 hektar dan 409.445 ton pada tahun 2008 menjadi 500.851 hektar dan 350.476 ton pada tahun 2012.

Pengembangan luas areal perkebunan kelapa sawit yang pesat dapat menjadi hegemoni bagi pengembangan perkebunan kelapa dan karet di Provinsi Riau. Pengembangan luas areal perkebunan kelapa sawit tidak hanya dilakukan dengan membuka lahan baru namun juga mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian lainnya termasuk lahan kelapa dan karet. Apabila kondisi alih fungsi lahan ini terus berlanjut bukanlah tidak mungkin akan menyebabkan rentannya perkembangan perekonomian di Provinsi Riau. Penetrasi perkebunan kelapa sawit yang masif cenderung mengarah pada pengembangan pertanian monokultur yang rentan terhadap gejolak perekonomian terkait dengan fluktuasi harga kelapa sawit dan produk-produk turunannya serta faktor-faktor lainnya di tingkat domestik maupun internasional. Berdasarkan kondisi tersebut maka upaya untuk mempertahankan perkembangan subsektor perkebunan, khususnya tanaman perkebunan andalan ekspor, perlu dilakukan, antara lain tanaman karet (Bakce dan Putra, 2014).

Selain masalah alih fungsi lahan, hasil penelitian Bakce dan Putra (2014) juga menyatakan bahwa penguasaan lahan yang sempit, harga karet yang berfluktuasi dan cenderung menurun, teknik pengelolaan yang sederhana menyebabkan kontribusi perkebunan karet terhadap pendapatan masyarakat dan perekonomian Provinsi Riau semakin menurun. Disamping itu Syahza et al. (2015) menyebutkan daya dukung wilayah usahatani karet alam yang rendah dan cenderung menurun, struktur pasar bersifat monopsoni, dan kurangnya jumlah industri pengolahan, merupakan permasalahan utama pengembangan perkebunan karet alam di Provinsi Riau.

Potret dari industri karet alam di Provinsi Riau kiranya tidak jauh berbeda dengan provinsi-provinsi penghasil karet lainnya di Indonesia. Provinsi Riau merupakan penghasil karet alam ketiga terbesar di Indonesia setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Lebih dari 80% perkebunan karet di Indonesia merupakan perkebunan karet rakyat yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti telah diuraikan di atas.

Menurut Arifin (2004) pengembangan industri hilir karet alam Indonesia menghadapi masalah yang sangat serius karena sistem insentif dan lemahnya pengawasan terhadap perkebunan karet rakyat untuk menghasilkan produk-produk karet berkualitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu upaya meningkatkan investasi industri karet Alam Indonesia melalui reformasi kebijakan, meliputi: (1) menata aspek

hukum, (2) menyederhanakan kebijakan pajak dan administrasi, (3) memperbaiki pelayanan publik di daerah, dan (4) menerapkan strategi investasi berbasis kesempatan kerja.

Sampai dengan saat ini, industri karet alam Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, masih “terperangkap” pada pengembangan produk-produk antara, sedangkan pengembangan industri hilir yang menghasilkan produk-produk akhir masih terbatas dilakukan. Lebih dari 90% produk-produk karet yang dihasilkan (Crump Rubber, SIR, RSS, dan Crepe) diekspor, hanya kurang dari 5% yang dioleh menjadi produk-produk akhir (Bakce, 2014). Oleh karenanya perlu upaya yang sungguh-sungguh baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk dapat mengembangkan industri hilir karet dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku yang terlibat dalam industri karet alam di Indonesia, khususnya para petani karet.

Secara umum makalah ini bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang strategi pengembangan industri hilir karet alam di Provinsi Riau. Secara spesifik bertujuan untuk: (1) menggambarkan potensi pengembangan industri hilir karet alam, dan (2) merumuskan strategi pengembangan industri karet alam di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Makalah ini merupakan bagian dari Penelitian Strategis Nasional (PENPRINAS) MP3EI 2011-2025 Tahun I yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan judul “Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Provinsi Riau”. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan dalam menyusun strategi kebijakan. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*).

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Daerah Riau wilayah daratan yakni Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi. Ketiga kabupaten tersebut mempunyai produktifitas berbeda yang disebabkan perbedaan tingkat kesuburan tanah.

Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait maupun dari pengusaha industri karet alam. Informasi yang diperlukan berupa kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perusahaan perkebunan dan informasi/data sekunder lainnya yang terkait. Data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal.

Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif peneliti maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan analisis pendahuluan. Kalau ditemui kekeliruan data dari yang diharapkan karena disebabkan oleh adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga didapatkan informasi yang lengkap.

Untuk mendapat hasil penelitian percepatan ekonomi daerah melalui penataan kelembagaan dan tataniaga karet alam, maka perlu dilakukan beberapa analisis, antara lain: (1) Kemampuan daya dukung wilayah (DDW) industri karet alam; (2) Potensi

pengembangan industri karet alam di daerah yang berpotensi untuk meningkatkan daya saing petani; (3) Prediksi *multiplier effect* ekonomi dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani karet alam; (4) Kesempatan peluang kerja dan usaha di daerah kajian; (5) Analisis strategi penataan kelembagaan dan tataniaga usahatani karet alam; dan (6) Terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan industri karet alam di daerah berpotensi.

Setelah kajian ini dilakukan diharapkan ditemukan Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam guna percepatan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah Riau. Pada artikel ini pembahasan akan lebih difokuskan pada Strategi Pengembangan Industri Karet Alam di Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pengembangan Industri Hilir Karet Alam

Pengembangan industri pengolahan karet alam di Provinsi Riau telah dilakukan sejak tahun 1970-an dengan dicanangkannya era *crumb rubber* oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia ketika itu. Pada awalnya didirikan lima perusahaan/pabrik pabrik *crumb rubber* di Provinsi Riau yaitu: (1) PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT. RICRY) yang beralamat di Pekanbaru, saat ini sudah melakukan perluasan pabrik di Simaliyang Kampar, namun belum beroperasi, (2) PT. Union Siak di Pekanbaru kemudian berubah nama menjadi PT. Hervenia Kampar Lestari di Sungai Pinang Kampar, (3) PT. P&P Bangkinang di Pekanbaru, kemudian melakukan perluasan pabrik di Stanum Bangkinang dan di Simaliyang Kampar, (4) PT. Tirta Sari Surya di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan (5) PT. Pulau Bintan Djaja di Kijang, Tanjung Pinang.

Sampai dengan tahun 2010 perkembangan selanjutnya industri pengolahan karet di Riau tumbuh beberapa perusahaan/pabrik antara lain: (1) PT. Perkebunan Nusantara V memiliki tiga pabrik, (2) PT. Numbing Jaya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, (3) PT. Mardec Nusa Riau di Kasikan, Kabupaten Kampar, (4) PT. Andalas Agro Lestari di Logas, Kabupaten Kuantan Singingi, (5) PT. Mitra Unggul Pusaka di Langgam, Kabupaten Pelalawan, (6) PT. Adei Plantation & Industri di Duri, Kabupaten Bengkalis, (7) PT. P&P Bangkinang, Kabupaten Kampar, (8) PT. Tirta Sari Surya, Kabupaten Indragiri Hulu, dan (9) PT. Mardec Nusa Riau, Kabupaten Kampar.

Tabel 1. Jumlah industri karet alam di Provinsi Riau menurut kapasitas produksi tahun 2013

No.	Jumlah Industri/Pabrik	Kapasitas Produksi (Ton/Tahun)	Jenis Produk
1.	PT. Andalas Agro Lestari	40,000	SIR 10, SIR 20
2.	PT. P&P Bangkinang (P)	24,000	SIR 10, SIR 20
	PT. P&P Bangkinang (S)	24,000	
3.	PT. Hervenia Kampar Lestari	60,000	SIR 10, SIR 20
4.	PT. Perkebunan Nusantara V	25,000	RSS 1, SIR 3L, SIR 10, SIR 20
5.	PT. Riau Crumb Rubber Factory (P)	24,000	SIR 10, SIR 20
	PT. Riau Crumb Rubber Factory (S)	30,000	
6.	PT. Tirta Sari Surya	45,000	SIR 10, SIR 20
	Jumlah	282,000	

Sumber: GAPKINDO, 2013

Pasca tahun 2010, industri pengolahan karet di Riau mengalami penurunan dimana dua pabrik *crumb rubber* dan satu pabrik lateks berhenti operasi sebagai akibat dari alih fungsi pengelolaan komoditas dari karet ke kelapa sawit. Dua pabrik yang mengalami alih komoditas adalah PT. Mitra Unggul Pusaka dan PT. Adei Plantation &

Indutri, sedangkan PT. Mardec Nusa Riau berhenti operasi dengan alasan kelangkaan bahan baku. Sampai dengan tahun 2013, jumlah industri pengolahan karet di Riau dapat dilihat pada Tabel 1.

Alasan bahwa ada perusahaan yang berhenti beroperasi karena kelangkaan bahan baku tidaklah tepat. Dari analisis berdasarkan data tahun 2014, terjadi kelebihan produksi bahan olah karet (bokar) dibandingkan dengan kemampuan olah pabrik (industri) karet terpasang di Daerah Riau. Hasil perhitungan DDW (Tabel 2) diketahui indeksnya 1,53. Artinya kemampuan wilayah menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Dari sisi bahan baku besarnya DDW tidak ada masalah, karena komoditas karet bukan bahan yang cepat rusak.

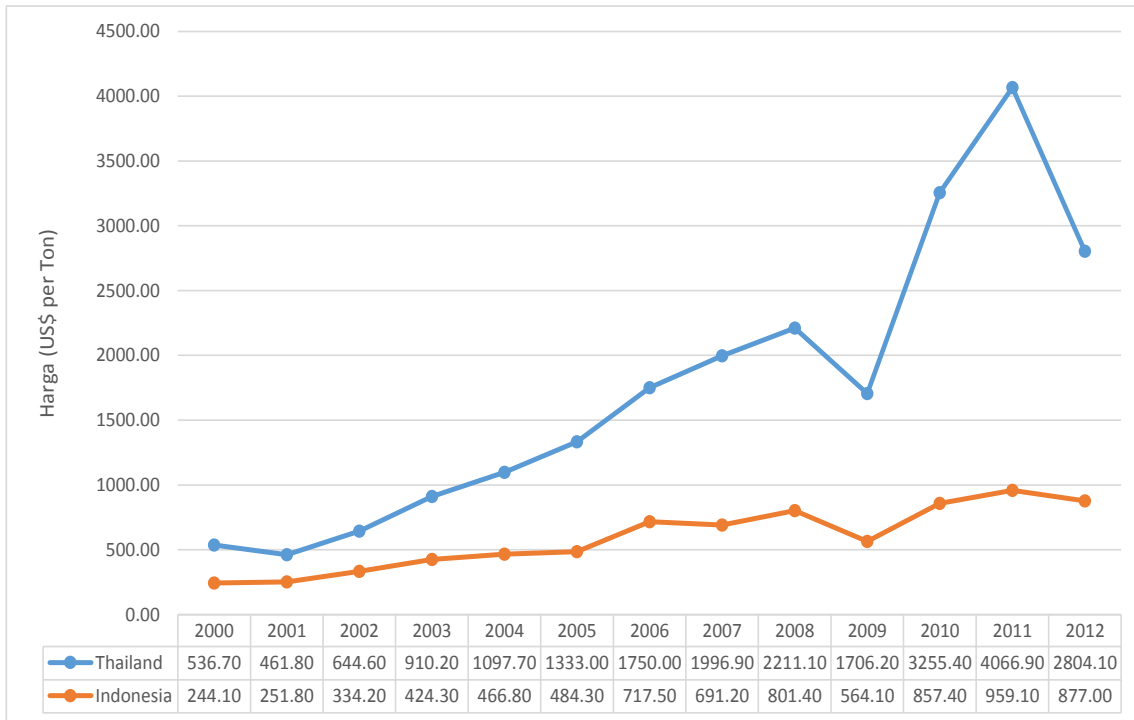
Tabel 2. Indikator dan proyeksi kekurangan industri pengolahan karet alam di Provinsi Riau

Indikator	Kuantitas
Luas Areal (ha), tahun 2014	505.264,00
Produksi bokar (ton), tahun 2014	354.256,63
Industri pengolah sudah ada (unit)	14
Kapasitas terpasang (ton/tahun)	282.000
Kemampuan mesin (ton/tahun)	232.000
Kelebihan bahan baku (ton/tahun)	122.256,63
Indeks daya dukung wilayah (DDW)	1,53
Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)	6

Sumber: Syahza et al., 2015

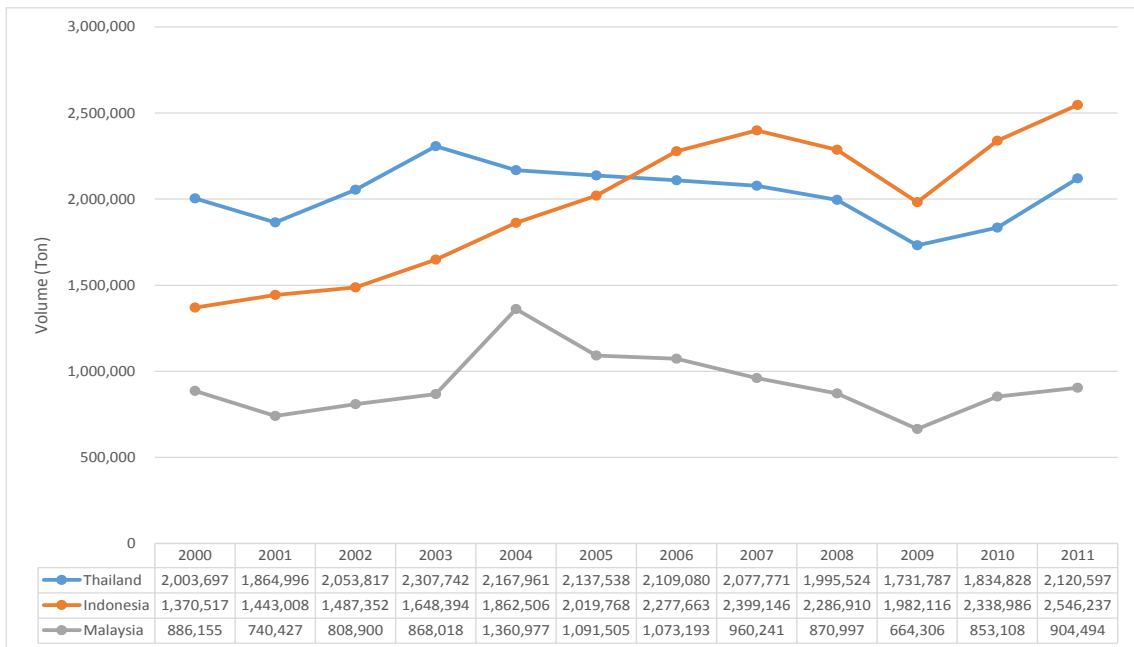
Pada tingkat petani, terjadi kelebihan penawaran bokar yang dapat menyebabkan turunnya harga dari sisi permintaan. Tingginya indeks DDW yang tidak dimbangi dengan jumlah industri pengolahan karet yang cukup untuk menghasilkan produk-produk antara dan produk-produk akhir dan kualitas bahan olahan karet yang rendah menyebabkan harga produk-produk karet alam Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara pesaing, khususnya Thailand. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa, harga karet di Thailand jauh lebih tinggi daripada harga karet di Indonesia.

Tingginya harga karet alam Thailand karena keberpihakan dan kesungguhan Pemerintah Thailand dalam pengembangan industri hilir karet. Sampai dengan tahun 2005 volume ekspor karet alam Thailand lebih besar dari Indonesia, namun pada periode berikutnya volume ekspor karet alam Indonesia lebih besar dari Thailand (Gambar 2). Penurunan ekspor karet alam di Thailand bukanlah disebabkan oleh penurunan produksi, namun karena kebijakan pemerintah Thailand dan antusiasme pengusaha di Thailand dalam mengembangkan industri hilir karet.



Sumber: FAO, 2014

Gambar 1. Perkembangan harga karet di Indonesia dan Thailand, 2000-2012



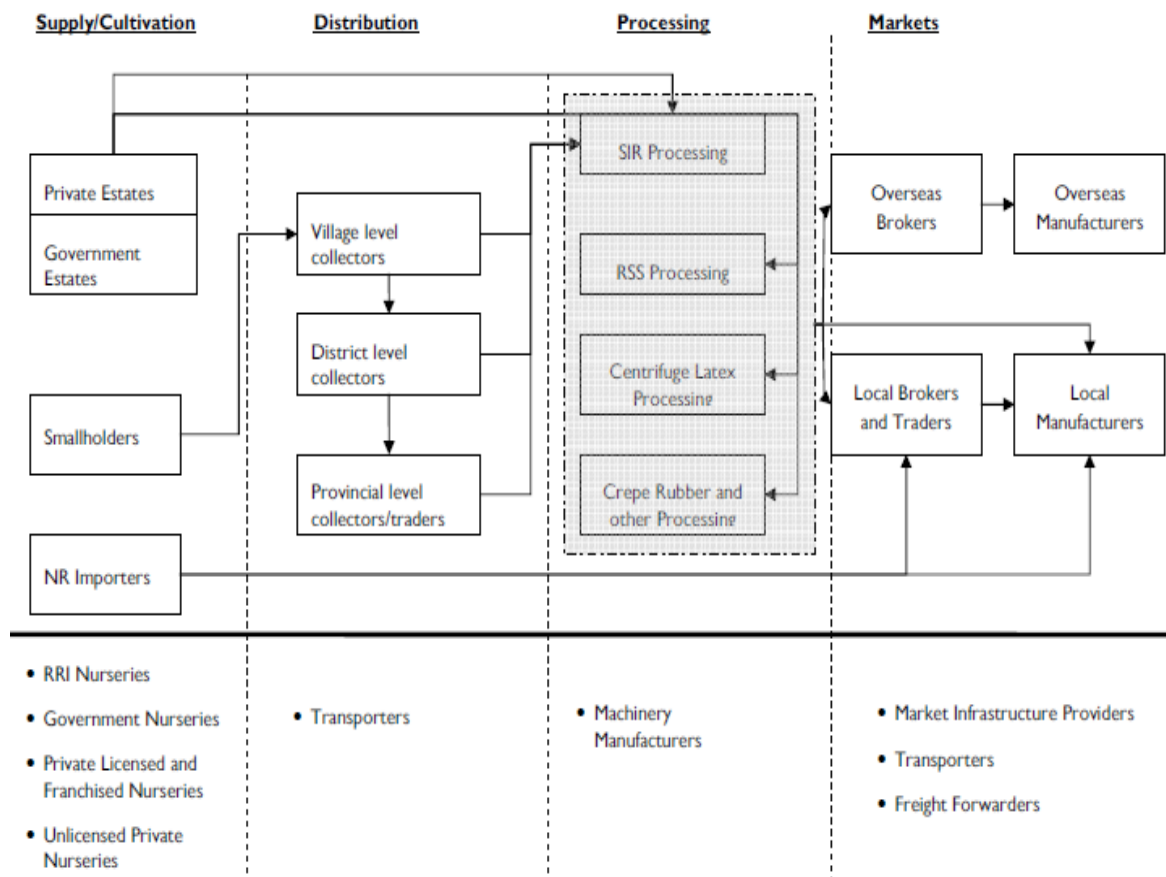
Sumber: FAO, 2014

Gambar 2. Perkembangan volume ekspor karet Indonesia, Thailand dan Malaysia, 2000-2012

Sampai dengan saat ini Indonesia masih “terperangkap” hanya mampu menghasilkan produk-produk antara dari karet. Mencermati rantai pasok (supply chain) yang digambarkan oleh USAID (2007) sebagaimana disajikan pada Gambar 3, produk-produk olahan karet alam Indonesia lebih didominasi untuk menghasilkan RSS, SIR dan

crepe. Lebih dari 90% produk-produk tersebut diekspor, kurang dari 5% yang diolah menjadi *final products*.

Sementara itu Thailand yang telah mengembangkan produk-produk akhir dari karet alam. Negara ini melalui Sri Tang (STA) Groups telah menghasilkan berbagai produk komponen kendaraan bermotor dari karet, sarung tangan dan berbagai produk akhir dari karet lainnya. Dari Gambar 4 dapat dinyatakan bahwa Thailand dan Indonesia memasok sebanyak 57% karet alam dunia, 31% Thailand dan 26% Indonesia. STA memberikan kontribusi 9% kepada pasar dunia, 13% pangsa pasar impor China dalam bentuk komponen kendaraan bermotor dari karet, dan ranking ke 4 industri pengolahan sarung tangan di dunia.



Sumber: USAID, 2007

Gambar 3. Supply chain industri karet alam Indonesia



Sumber: STA Group, 2013

Gambar 4. Supply chain industri karet alam Thailand

Strategi Pengembangan Industri Hilir Karet Alam

Mencermati uraian yang telah dikemukakan di atas, Provinsi Riau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya memiliki potensi bagi pengembangan industri hilir karet. Daya dukung wilayah (DDW) yang tinggi dan permintaan terhadap produk-produk hilir karet untuk kebutuhan domestik dan internasional sangat tinggi dan cenderung meningkat. Dengan berkembangnya industri hilir karet di Indonesia akan mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk-produk karet yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan para pelaku industri karet alam, khususnya petani.

Dalam rangka mewujudkan hilirisasi karet Alam di Indonesia pada umumnya, khususnya di Provinsi Riau, setidaknya diperlukan tiga strategi pokok, yaitu: (1) memperkuat pengembangan hulu-hilir industri karet alam, (2) mempercepat pembangunan kluster industri karet alam melalui pengembangan kawasan industri, dan (3) menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif.

Pengembangan Hulu-Hilir Karet Alam

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa luas areal dan produksi tanaman karet di Provinsi Riau cenderung menurun dari 528.655 hektar dan 409.445 ton pada tahun 2008 menjadi 500.851 hektar dan 350.476 ton pada tahun 2012. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh alih fungsi lahan karet ke kelapa sawit secara persisten dari tahun ke tahun. Apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan secara sungguh-sungguh dikhawatirkan sepenuhnya lahan karet disubstitusi oleh kelapa sawit. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan sarana produksi, seperti bibit unggul, pupuk, pestisida dan peralatan, sehingga mampu mengurangi beban petani sekaligus meningkatkan produktivitas karet alam. Penerapan kebijakan ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat agar bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk komoditas lainnya (kelapa sawit). Disamping itu, perlu kebijakan

stabilitas dan peningkatan harga karet melalui penerapan inovasi teknologi yang mampu meningkatkan kualitas bahan olahan karet (bokar).

Penurunan produksi karet alam di Provinsi Riau diikuti dengan penurunan jumlah industri antara karet alam dan kapasitas produksinya. Padahal daya dukung wilayah bagi pengembangan industri karet alam masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa secara psikologis dan ekonomi dengan memegang prinsip “opportunity cost”, popularitas pengembangan industri karet alam di Provinsi Riau semakin rendah, cenderung beralih ke industri kelapa sawit. Dengan demikian, upaya untuk mengintegrasikan kembali hulu-hilir industri karet alam di Provinsi Riau perlu dilakukan.

Peranan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan perusahaan perkebunan besar, perlu kembali digalakkan dan ditingkatkan. Peranan tersebut di sektor hulu dilakukan dengan mengembangkan sistem kemitraan antara perusahaan dan petani sehingga dihasilkan produksi karet dengan produktivitas yang tinggi dan kualitas yang baik. Disamping itu, dalam jangka pendek perusahaan-perusahaan dapat kembali meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara yang dihasilkan. Selanjutnya dalam jangka menengah dan panjang perusahaan didorong untuk secara bertahap mengembangkan industri hilir karet yang mampu menghasilkan produk-produk akhir yang bernilai tambah tinggi. Untuk itu, berbagai kemudahan dalam pengurusan administrasi usaha dan insentif pajak perlu diberikan pemerintah.

Pembangunan Kluster Industri Karet Alam

Aspek legalitas dalam pengembangan kluster industri karet alam Indonesia telah di atur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 112/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kluster Industri Karet dan Barang Karet. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa industri karet dan barang karet dikelompokkan menjadi tiga kelompok industri, yakni kelompok industri hulu, kelompok industri antara, dan kelompok industri hilir. Kelompok industri hulu mencakup: bahan olahan karet (bokar) dan kayu karet. Kelompok industri antara mencakup: crumb rubber, sheet/RSS, latek pekat, thin pole crepe, dan brown crepe. Kelompok industri hilir mencakup: ban dan produk terkait serta ban dalam, barang jadi karet untuk keperluan industri, barang karet untuk kemiliteran, alas kaki dan komponennya, barang jadi karet untuk penggunaan umum, dan alat kesehatan dan laboratorium.

Kluster industri hulu dan industri antara karet dan barang karet idealnya dikembangkan pada masing-masing kabupaten sentra produksi bahan olahan karet (bokar). Berdasarkan data BPS Provinsi Riau (2014), kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau sebagai sentra produksi karet yang memiliki luas lahan lebih dari 5000 hektar adalah Kabupaten Kampar (92.537 hektar), Kabupaten Rokan Hulu (56.039 hektar), Kabupaten Pelalawan (25.856 hektar), Kabupaten Indragiri Hulu (58.627 hektar), Kabupaten Kuantan Singingi (146.474 hektar), Kabupaten Bengkalis (35.000 hektar), Kabupaten Rokan Hilir (26.390 hektar), Kabupaten Siak (16.129 hektar), Kabupaten Indragiri Hilir (5.369 hektar), dan Kabupaten Kepulauan Meranti (19.110 hektar). Kota Dumai dan Kota Pekanbaru juga menghasilkan karet dengan luas masing-masing 2.355 hektar, dan 2.926 hektar.

Untuk pengembangan kluster industri hilir karet dapat dilakukan pada kawasan-kawasan industri yang sudah ditetapkan dan dikembangkan di Provinsi Riau, yakni Kawasan Industri Pelintung Dumai, Kawasan Industri Kuala Enok, dan Kawasan Industri Buton. Mencermati jarak tempuh dari sentra-sentra produksi karet alam di Provinsi Riau maka Kluster Industri Hilir Karet dapat diintegrasikan pada ketiga kawasan industri tersebut. Kawasan Industri Pelintung Dumai dapat dikembangkan

sebagai kluster industri hilir karet yang menampung produksi kluster industri hulu dan industri antara karet dari Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar (khususnya Kampar Kanan). Kawasan Industri Buton dikembangkan kluster industri hilir karet yang menampung produksi dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kampar (Kampar Kiri). Kawasan Industri Kuala Enok dikembangkan kluster industri hilir karet yang menampung produksi dari Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan membangun infrastruktur dan berbagai fasilitas yang baik pada kawasan-kawasan industri yang ada diharapkan dapat mendorong berkembangnya industri hilir karet di Provinsi Riau. Disamping itu, pengembangan kluster industri hilir karet pada kawasan industri mampu mewujudkan manfaat aglomerasi atau manfaat skala ekonomi sehingga produk-produk hilir karet yang dihasilkan lebih efisien dan berdaya saing.

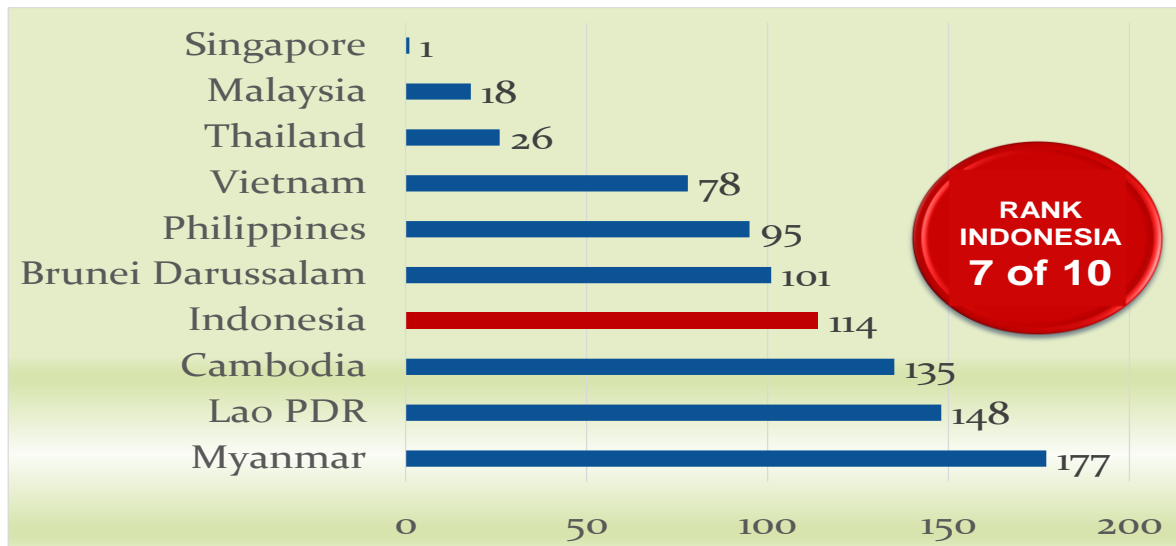
Iklm Investasi dan Usaha yang Kondusif

Selain dua strategi yang telah dikemukakan sebelumnya, strategi ketiga dan yang terpenting dalam pengembangan industri hilir karet adalah upaya menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Menurut Bakce (2015), tantangan utama dalam mengembangkan perekonomian Indonesia, termasuk pertanian, adalah upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, yakni upaya menciptakan kemudahan dan kepastian usaha baik bagi pengusaha domestik maupun internasional.

World Bank Group telah menetapkan peringkat *doing business*. *Doing business* melihat bagaimana regulasi bisnis memberikan ide-ide yang baik dalam memulai dan mengembangkan bisnis atau sebaliknya. Pemeringkatan *doing business* fokus untuk mengukur efisiensi, dengan cara merekam prosedur, waktu dan biaya untuk memulai dan mengembangkan suatu bisnis. Peringkat kemudahan *doing business* adalah 1-189. Peringkat kemudahan melakukan bisnis yang tinggi berarti lingkungan peraturan lebih kondusif untuk memulai dan mengoperasikan perusahaan. Pemeringkatan ditentukan dengan metode skoring berdasarkan pada 10 topik, masing-masing topik terdiri dari beberapa indikator. Adapun 10 topik tersebut adalah (World Bank Group, 2015): (1) Starting a Business, (2) Dealing with Construction Permits, (3) Getting Electricity, (4) Registering Property, (5) Getting Credit, (6) Protecting Minority Investors, (7) Paying Taxes, (8) Trading Across Borders, (9) Enforcing Contracts, dan (10) Resolving Insolvency.

Berdasarkan hasil pemeringkatan oleh World Bank Group (2015), Indonesia menempati peringkat 114 dari 189 negara, dan peringkat ke 7 dari 10 negara anggota ASEAN berdasarkan ranking kemudahan melakukan usaha (Gambar 5). Hal ini mengindikasikan bahwa iklim usaha di Indonesia masih relatif buruk dan perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Rendahnya peringkat kemudahan melakukan usaha di Indonesia mencerminkan bahwa masih banyak tantangan dan kelauman yang harus dihadapi dan diperbaiki sehingga menjadi negara yang memiliki daya saing yang tinggi. Kepemilikan kekayaan sumberdaya alam, memiliki keunggulan komparatif, saja belum cukup menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang disegangi dalam percaturan liberalisasi dan globalisasi ekonomi.



Sumber: World Bank Group, 2015, diolah

Gambar 5. Peringkat kemudahan melakukan usaha negara anggota ASEAN, 2014

Rendahnya peringkat kemudahan melakukan usaha terjadi hampir pada seluruh topik dari 10 topik *doing business*. Hal ini dapat dijelaskan berikut ini (Gambar 6).

(a) Memulai usaha (*starting a business*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam memulai usaha adalah prosedur, waktu, biaya, dan modal minimum yang perlu disetor untuk memulai usaha. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Indonesia berada pada peringkat 155 dari 189 negara di dunia, dan peringkat ke 6 dari 10 negara anggota ASEAN.

(b) Berurusan dengan izin konstruksi (*dealing with construction permits*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam pengurusan izin konstruksi adalah prosedur, waktu, dan biaya untuk melengkapi seluruh persyaratan untuk membangun gudang. Indonesia berada pada peringkat 153 di dunia dan peringkat 9 di ASEAN.

(c) Mendapatkan listrik (*getting electricity*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam mendapatkan listrik adalah prosedur, waktu, dan biaya untuk dapat terhubung ke jaringan listrik. Indonesia berada pada peringkat 78 di dunia dan peringkat 6 di ASEAN.

(d) Mendaftarkan properti (*registering property*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam mendaftarkan properti adalah prosedur, waktu, dan biaya untuk mentransfer properti. Indonesia berada pada peringkat 117 di dunia dan peringkat 8 di ASEAN.

(e) Mendapatkan kredit (*getting credit*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam mendaftarkan kredit adalah peraturan tentang jaminan bergerak dan sistem informasi kredit. Indonesia berada pada peringkat 71 di dunia dan peringkat 5 di ASEAN.

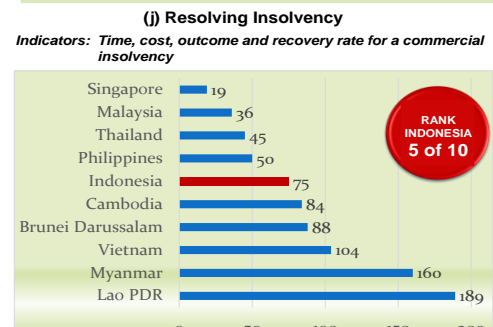
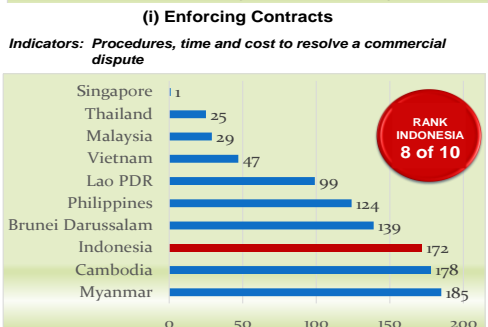
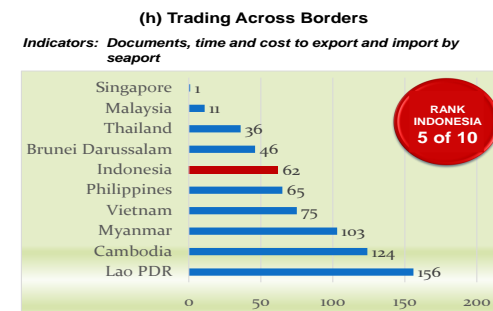
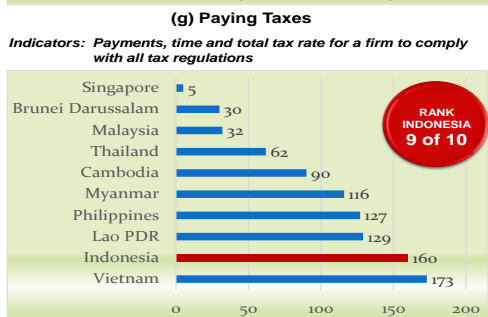
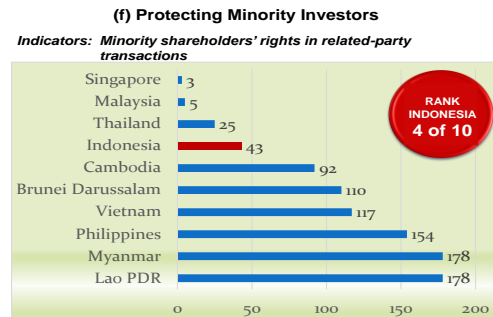
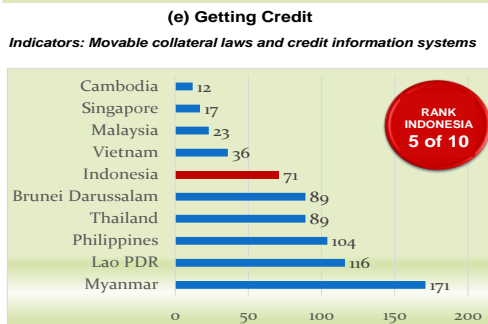
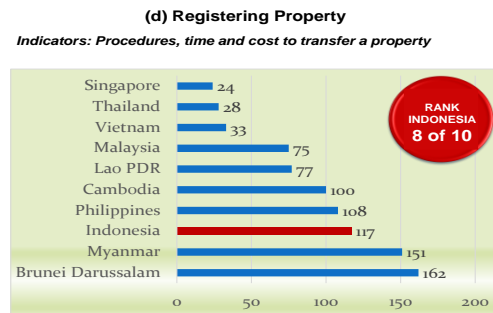
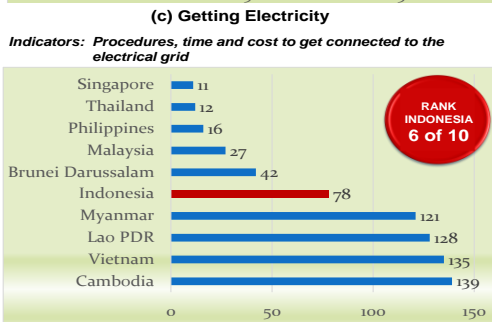
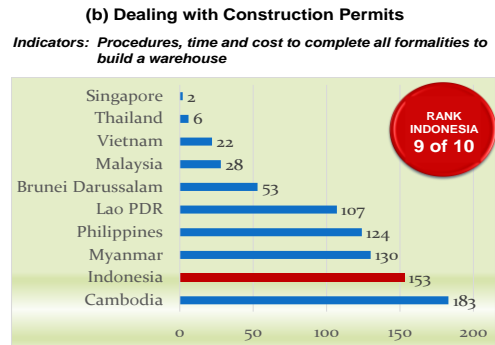
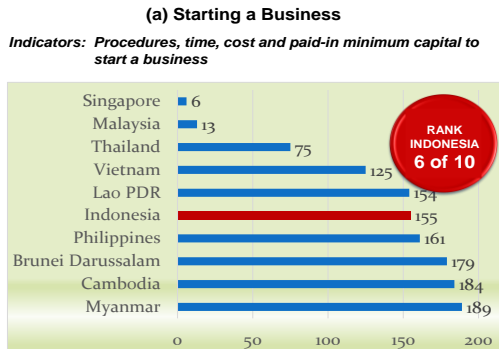
(f) Melindungi investor minoritas (*protecting minority investors*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kesungguhan dalam melindungi investor minoritas adalah perlindungan atas hak-hak pemegang saham minoritas dalam melakukan transaksi dengan pihak lain. Indonesia berada pada peringkat 43 di dunia dan peringkat 4 di ASEAN.

(g) Membayar pajak (*paying tax*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam membayar pajak adalah pembayaran, waktu, dan tariff pajak total untuk perusahaan agar mematuhi seluruh

peraturan pajak. Indonesia berada pada peringkat 160 dunia dan peringkat 9 di ASEAN.



Sumber: World Bank Group, 2015, diolah
 Gambar 6. Sepuluh topik peringkat kemudahan melakukan usaha negara anggota ASEAN, 2014

(h) Perdagangan lintas batas (*trading across borders*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam perdagangan lintas batas adalah dokumen, waktu, dan biaya untuk ekspor dan impor melalui pelabuhan. Indonesia berada pada peringkat 62 di dunia dan peringkat 5 di ASEAN.

(i) Menegakkan kontrak (*enforcing contracts*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam menegakkan kontrak adalah prosedur, waktu, dan biaya untuk menyelesaikan sengketa komersial. Indonesia berada pada peringkat 172 di dunia dan peringkat 8 di ASEAN.

(j) Menyelesaikan kepailitan (*resolving insolvency*)

Indikator yang digunakan untuk menilai kemudahan dalam menyelesaikan kepailitan adalah waktu, biaya, keluaran, dan tingkat pemulihan kepailitan komersial. Indonesia berada pada peringkat 75 di dunia dan peringkat 5 di ASEAN.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Provinsi Riau memiliki potensi bagi pengembangan industri hilir karet. Daya dukung wilayah (DDW) yang tinggi dan permintaan terhadap produk-produk hilir karet untuk kebutuhan domestik dan internasional sangat tinggi dan cenderung meningkat. Dengan berkembangnya industri hilir karet di Provinsi Riau, umumnya di Indonesia, akan mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk-produk karet yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan devisa negara dan kesejahteraan para pelaku industri karet alam, khususnya petani.

Tiga strategi pokok perlu diimplementasikan dalam pengembangan industri hilir karet di Provinsi Riau, yaitu: (1) memperkuat pengembangan hulu-hilir industri karet alam, (2) mempercepat pembangunan kluster industri karet alam melalui pengembangan kawasan industri, dan (3) menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif.

Upaya memperkuat pengembangan hulu-hilir industri karet dilakukan dengan mengembangkan sistem kemitraan antara perusahaan dan petani. Disamping itu, dalam jangka pendek perusahaan-perusahaan dapat kembali meningkatkan kapasitas dan kualitas produk antara yang dihasilkan. Selanjutnya dalam jangka menengah dan panjang perusahaan didorong untuk secara bertahap mengembangkan industri hilir karet yang mampu menghasilkan produk-produk akhir yang bernilai tambah tinggi.

Untuk pengembangan kluster industri hilir karet dapat dilakukan pada kawasan-kawasan industri yang sudah ditetapkan dan dikembangkan di Provinsi Riau. Ada tiga kawasan industri yang sudah ditetapkan di Provinsi Riau, yakni Kawasan Industri Pelintung Dumai, Kawasan Industri Kuala Enok, dan Kawasan Industri Buton.

Dengan menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif dapat meningkatkan daya saing produk-produk industri karet alam, yakni dengan menciptakan kemudahan dan kepastian usaha baik bagi pengusaha domestik maupun internasional. Iklim usaha yang kondusif merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mendorong surplus neraca pembayaran, meliputi surplus neraca perdagangan dan surplus neraca modal.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Bustanul. (2004). Policy reforms for rubber-industry investment. Invited paper presented at the International Rubber Conference and Exhibition 2004, on December 13-15, 2004, in Jakarta.

Bakce, Djaimi (2015). Pertanian dan masyarakat ekonomi ASEAN. Makalah disajikan pada Seminar Ekonomi Petanian dengan tema: "Tantangan pertanian dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Daerah

Pekanbaru bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau pada tanggal 7 Mei 2015 di Pekanbaru.

- Bakce, Djaimi, dan Andri Yama Putra. (2014). Dampak kebijakan ekonomi terhadap keputusan ekonomi rumahtangga petani karet di Kabupaten Kuantan Singigi. Makalah disajikan pada Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Dekan BKS-PTN Wilayah Barat dengan tema: “Penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan untuk mencapai kemandirian pangan dan mengembangkan energi berbasis pertanian” yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada tanggal 19-21 Agustus 2014 di Bandar Lampung.
- Bakce, Djaimi. (2014). Supply chain management industri karet di Indonesia. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Ekonomi Pertanian dengan tema: “Mensiasati ancaman degradasi industri perkebunan di Provinsi Riau” yang diselenggarakan oleh UIN SUSKA Riau bekerjasama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komisariat Daerah Pekanbaru pada tanggal 1 November 2014 di Pekanbaru.
- BPS Provinsi Riau. (2014). Riau dalam angka. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.
- FAO. (2014). Production and trade. Faostat.org. <http://www.fao.org>.
- GABKINDO. (2014). Laporan tahunan. Pekanbaru: GABKINDO.
- STA Group. (2013). A world leading natural rubber player. Opportunity Day Presentation, 20 May 2013 in Bangkok.
- Syahza, Almasdi, Djaimi Bakce, dan Nur Hamlim. (2015). Makalah disajikan pada Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Dekan Bidang Ilmu Pertanian BKS PTN Barat dengan tema: “Pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis kedaulatan pangan dan energi untuk meningkatkan perekonomian nasional” yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya pada tanggal 20-21 Agustus 2015 di Palangkaraya.
- Syahza, Almasdi, Suarman, Mitri Irianti, dan Djaimi Bakce. (2015). Strategi percepatan pembangunan ekonomi melalui penataan kelembagaan dan industri karet alam di Provinsi Riau. Penelitian MP3EI tahun I. Jakarta: DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- The World Bank Group. (2015). Doing business 2015: going beyond efficiency. 12th Edition. Washington DC: The World Bank.
- USAID. (2007). A value chain of the rubber industry in Indonesia. Jakarta: USAID.